

TRANSKRIP DISKUSI TERBUKA

“Membangun Kultur Kemandirian & Kesetaraan dalam Advokasi Disabilitas”

24 Juni 2022 (15.00-18.00 WIB)– Rumah IVAA

Pembicara:

- Sipora Purwanti (SIGAB – Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel)
- Triyono (Difabike Indonesia)
- Setia Adi Purwanta (Dria Manunggal)

Moderator: Kus Sri Antoro (Wayang Limbah Ki Samidjan)

Penerjemah Bahasa Isyarat: JBI (Juru Bahasa Isyarat)

Pembukaan oleh MC (Shafa Salsabila)

Tuntutan sudah disuarakan tapi tindakan realisasi tidak menunjang penumbuhan ekosistem yang mendukung kemanusiaan. Sudah hadir Mbak Sipora, Pak Triyono dan Pak Setia. Juga Mbak Eka dan Mbak Ragil dari JBI (Juru Bahasa Isyarat). Diskusi akan dipandu oleh Mas Kus dari Wayang Limbah Ki Samidjan. Diskusi saya serahkan ke Mas Kus.

Kus:

Salamat sore, beruntung sekali ktia bisa berkumpul sore ini untuk mendiskusikan persoalan yang seolah biasa tapi sebenarnya serius. Ini adalah rangkaian dari pameran Mas Nanang. Dan nanti ada diskusi lagi dengan tema Seni dan Disabilitas.

Kita menghadirkan tiga narasumber. Ada pak Setia, Ibu Sipora, dan Mas Triyono. Setiap pembicara dipersilakan memperkenalkan diri secara singkat sebelum memaparkan pemikirannya.

Setia:

Saya Setia Adi Purwanta dari Dria Manunggal. Saya senang sekali banyak ketemu teman-teman lama. Ketika bicara tentang advokasi, awalnya istilah itu dipakai dalam strategi perang. Siasat untuk menguasai wilayah, merebut wilayah. Advokasi adalah ketika kita mengalahkan musuh dan merebutnya kembali. Tapi dalam hal ini merebut wilayah artinya merebut kembali apa yang sudah diambil secara paksa oleh pihak lain. Dari situ dikenal istilah advokasi. Merebut wilayah kita yang telah direbut oleh orang lain. Dulu pendekatannya adalah: siapa lawan siapa kawan.

Terkait dengan HAM, sampai sekarang persoalan HAM difabel masih menjadi persoalan. Mas Kus meminta saya untuk membicarakan soal apa hasil advokasi yang telah saya lakukan. Ketika bicara soal hasil, pasti ada indikator dan tujuan. Hasil itu adalah ketercapaian antara tujuan dan hasil itu sendiri. Melihat itu, dulu advokasi dipetakan menjadi dua: berbasis kebijakan (*policy*) dan berbasis rakyat atau gerakan (*people*). Sekarang di Eropa sedang ramai menuntut keluar dari NATO misalnya. Itu advokasi yang berbasis pada rakyat (*people*). Sedang untuk policy yang disasar adalah kebijakan. Ketika kebijakan ada, keluar atau diubah, realitanya akan terjadi pembiakan, karena kebijakan itu dibuat oleh pemerintah bersama dengan wakil rakyat, kemudian dilakukan oleh pemerintah dan diawasi oleh yudikatif. Jadi untuk negara-negara yang mendasarkan paham trias politica, advokasinya lebih ke kebijakan. Dulu, tekanannya adalah pada bagaimana membuat kebijakan yang memihak.

Kita juga pernah melakukan advokasi berbasis gerakan, misal pada 1966. Lalu pada 1998 melalui gerakan mahasiswa yang besar. Kalau kita melihat, terutama untuk persoalan difabel, sekarang sudah didesakkan untuk kita memiliki atau mengakui bahwa difabel itu, atau diskriminasi itu terjadi bukan karena kondisi fisik tapi karena sikap masyarakat atau pemerintah. Cacat itu tidak ada, yang ada adalah pencacatan: dikondisikan cacat. Itu adalah pendekatan *social model*. Jadilah dia cacat.

Kalau kita melihat dengan basis itu, maka sasaran dari advokasi itu adalah: pertama, pemerintah dengan segala macam instrumennya; kedua, masyarakat; ketiga, difabel itu sendiri. Yang saya ingin tekankan justru di poin ketiga. Saya mencoba melihat bahwa yang perlu ditengok adalah advokasi individualnya (*individual advocacy*). Ini belum banyak dibicarakan. Bahwa sekarang, apalagi dalam era digital, kemampuan individu menjadi sangat berpengaruh. Saya pernah diketawai oleh kawan ketika saya banyak teriak soal aksesibilitas fasilitas umum, karena teman-teman tuna netra sekarang tidak terlalu butuh *guiding block*, dll. Sekarang kerja di rumah sudah bisa dengan teknologi digital.

Sehingga advokasi perlu kita luaskan. Fasilitas memang diperlukan, tetapi kita juga perlu memperhatikan bahwa advokasi individu dalam hal memasuki dunia maya. Karena di dunia itu sudah tidak ada difabilitas atau non-difabilitas. Ini perlu digarap juga. Kawan-kawan perlu dibangun kemampuannya untuk menguasai teknologi digital. Sudah cukup banyak kawan-kawan yang menyelesaikan persoalan dari itu. Yang penting adalah bagaimana advokasi individu dipetakan dan ada *share* kemampuan untuk membangun advokasi itu.

Mas Nanang menjadi menarik. Dia memberanikan diri meletakkan diri pada posisi yang berbeda. IVAA menjadi media untuk aktualisasi diri. Ini bentuk dari *self-advocacy*. Ini juga perlu banyak.

Kawan-kawan juga perlu memahami jebakan-jebakan. Sekarang kita sudah ada di dalam era *post-truth*. Bukan sekedar postmodern, tapi *post-truth* itu ketika kita ada di dalam

ketidakbenaran atau ketidaksalahan. Benar dan salah sudah tipis bedanya. Perebutan cara pandang. Dikatakan benar jika dari sisi itu benar, begitu juga sebaliknya. Satu contoh: pengalaman-pengalaman saya dan beberapa kawan. Kami kenal salah satu anggota dewan untuk memberikan jalan kepada kita berkomunikasi dengan pemerintah. Kita lihat ini sebagai kesempatan untuk masuk ke wilayah perda. Tapi realitanya itu adalah sebuah proyek. Itu dikerjakan oleh tim yang sama sekali tidak paham dengan apa yang kita perjuangkan. Akhirnya perda muncul tapi tidak sesuai harapan kita, atau tidak dilaksanakan. Pejabat ganti, semua juga ganti lagi.

Keberhasilan saya di mana? Ya kalau melihat dari kisah tadi, maka saya belum berhasil. Keberadaan fasilitas umum adalah simbol pengakuan negara kepada difabel. Tapi jangan lelah, dan ini tidak akan berhenti. Nasibmu ada pada dirimu sendiri dan Tuhan. Jadi bukan “Berikan kami kesempatan!”, tapi kesempatan harus direbut. Hidup ini perebutan.

Sekarang ada digitalisasi, meskipun di sisi lain kawan-kawan difabel juga kalah dengan perebutan ini. Tapi bahwa ada ruang yang bisa direbut. Maka ayo kita rebut! Dan yang penting adalah gerakan-gerakan antar individu yang kemudian berjejaring. Terima kasih.

Kus:

Catatan yang saya tangkap, bahwa advokasi individu lebih bisa diandalkan dari pada gerakan massa. Karena setiap orang bisa membangun otoritasnya sendiri dan bisa jadi berpengaruh.

Sipora:

Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya sangat berbangga hati karena di sini banyak kawan muda yang masih semangat untuk melakukan gerakan advokasi pencapaian hak disabilitas. Saya itu salah satu korban kompornya pak Setia. Saya ingat pada 2001 dicemplungkan ke forum masyarakat basis Surakarta yang isinya pemulung, PKL, dan difabilitas. Saya diminta Pak Setia untuk mengorganisir kelompok ini. Tiap kelompok saling berebut ruang. Akhirnya dari forum itu kami menyadari bahwa kami masyarakat marjinal dipecah belah oleh penguasa dan sistem. Tiap malam kami muter dari ringan Semar ke titik-titik lain. Awal pertemuan tidak ada keputusan apapun. Bahkan egosentris antar kelompok masih tinggi. Sampai pada pertemuan keenam, kami baru sadar bahwa kami adalah korban sistem. Kita masih harus berjuang di negeri yang sudah merdeka.

Kita melakukan analisa bersama soal tantangan dan hambatan. Akhirnya justru kami bisa membuat desain trotoar yang bisa memberi ruang untuk penyandang disabilitas, PKL, dan sopir becak. Di solo ada di Jl Slamet Riyadi, itu salah satu karyanya. Yang heboh saat itu ketika pasar klitikan Banjarsari mau digusur. Waktu ada formasbar, itu tidak bisa digusur. Baru bisa digusur ketika rezimnya Jokowi. Waktu mau penggusuran, kami berdemo bersama. Pemkot sampai membuat organisasi tandingan, banyak terjadi kooptasi, sehingga

forum masyarakat basis terpecah. Kami sadari saat itu kami terlalu banyak yang mengintervensi, apalagi soal penyusup dari kelompok yang punya kuasa. Itu sangat luar biasa. Ketika ada pertemuan sering ada yang mengacau.

Sore ini saya mendapat tema yang agak susah. Judulnya “Tantangan dan Strategi Advokasi Disabilitas yang Dilandasi Empati dan Emansipasi”. Sangat filosofis sekali. Tapi saya akan sedikit *share* saja. Selama ini kami merasakan bahwa perspektif menjadi tantangan sekaligus indikator yang besar. Perubahan selalu diawali oleh perspektif pemimpinnya. Misal, soal *guiding block*, bisa kita rubah karena berawal dari perspektif pemimpinnya. Tapi ketika pejabat berganti, perspektif juga berubah.

Di aspek aktor penggerak juga sama. Jika perspektifnya tidak kuat, maka sulit juga. Suatu ketika di Solo inovasinya terlalu besar, jadi *guiding block* dirubah menjadi warna hitam. Ini terjadi berkali-kali. Ketika PDI menang atas Orde Baru, *guiding block* dirubah menjadi merah. Ketika saya protes, ada komentar dari tuna netra bahwa dia tidak bisa melihat warna apapun itu. Ini menjadi masalah internal dari komunitas kami. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita membangun perspektif eksternal. Partisipasi selama ini yang ada masih semu. Itu hampir kami temukan di pokja (kelompok kerja) yang dibentuk hanya utk memenuhi formalitas. Maka merebut menjadi penting.

Kemudian kebijakan yang disharmonis. Terkait pembangunan trotoar, waktu itu *guiding block* menabrak pohon karena terbentur perda yang melarang penebangan pohon. Problem tidak terpecahkan ketika sudah berkaitan dengan sistem anggaran. Sebenarnya dalam UU bangunan gedung, jika suatu bangunan itu tidak bisa diakses, berarti boleh dirobohkan. Tapi selama ini belum ada yang menggugat fasilitas publik yang tidak bisa diakses. Di aspek hukum kita masih sangat keteteran.

Kami juga terjebak pada kungkungan marjinalisasi, diskriminasi, distempel negatif, dll. Bahkan kami menjadi kekerasan struktural. Banyak kebijakan yang mendiskriminasi difabilitas. Bagaimana kita akan melakukan advokasi tentang kuota 100:2, sementara sekarang ini sistem untuk menerima tenaga kerja, mereka (pemerintah) sudah bikin label: tidak boleh buta, tuli, disabilitas intelektual, hanya boleh tuna daksa yang ringan, dll? Bahkan itu ada di CPNS juga. Disarankan juga untuk tes psikologis. Pasti semua orang tidak lolos, karena semua orang punya risiko stress. Tapi selama ini, ketika menghadirkan tes psikologis, kawan-kawan yang punya kecenderungan disabilitas intelektualitas sudah mundur duluan.

Kemudian soal bagaimana kita mendorong sumber daya yang handal. Soal bagaimana membangun kader-kader gerakan advokasi. Tidak hanya internal tapi juga bagaimana kita menciptakan aktor kunci di pemerintahan serta jaringan NGO dan yang lain. Kita ini disabilitas sudah berada di dalam stigma. Kadang kalau kita ngomong, karena ada stigma itu, kita tidak dihiraukan. Maka kita butuh jejaring yang kuat.

Sangat penting membangun konsolidasi gerakan sehingga gerakan bisa berdampak secara sistemik. Kalau kita belajar dari gerakan gender dan anak, mereka punya isu strategis yang digotong setiap tahunnya. Itu yang belum ada di gerakan disabilitas. Konsolidasi dlm gerakan juga belum terbangun. Padahal, kalau kita bersatu terorganisir, siapa yang bisa melawan kita?

Selanjutnya adalah media. Soal bagaimana kita mengampanyekan disabilitas dengan media yang menarik dan populer. Gerakan perempuan mulai menulis sastra. Beberapa orang dari kawan-kawan disabilitas ada yang jadi penulis, tapi mereka tidak menulis untuk urusan disabilitas. Sebenarnya kalau kita belajar pada media populer, kita bisa belajar dari misal cerita wayang. Ada Dretarastra, Sengkuni, Punawakan, anak Krisna (yang disabilitas dan disembunyikan di dalam perpustakaan, tetapi malah menjadi intelektual). Sengkuni, ada ketidakadilan yang diperjuangkannya. Drestarastra, seberapa besar diskriminasi yang menghimpitnya. Nilai-nilai yang positif di situ menjadi hilang. Sebenarnya kalau itu mau ditarik ke humanisme, itu sangat menarik. Kalau diskriminasi terus terjadi di level masyarakat, negara akan hancur.

Tapi jangan seperti media mainstream saat ini. Seseorang menjadi disabilitas karena mencuri. Lalu soal isu orang pinggiran yang mengharapkan empati dengan cara yang tidak manusiawi. Ini perlu kita perangi dengan mempertahankan nilai humanisme dan mendudukkan kawan-kawan disabilitas secara bermartabat. Media menjadi langkah strategis untuk membangun perspektif di masyarakat. Karena melalui kisah, akan mengubah banyak perspektif.

Posisi disabilitas tidak berada pada posisi strategis. Kawan-kawan yang berada pada ranah pengambil keputusan (eksekutif/ legislatif) kurang punya posisi tawar untuk membangun pemahaman positif. Contoh kasusnya adalah ketika seorang tuna rungu-wicara yang dipaksa bicara oleh seorang menteri. Seorang pejabat disabilitas diminta oleh menteri itu untuk memberi dua alibi guna membela ibu menteri. Kita harus menciptakan agar kader-kader di pemerintahan punya daya tawar yang strategis.

Tantangan lagi adalah soal aksesibilitas: 1) Fisik, yang berhubungan dengan bangunan, transportasi, dll; 2) Non fisik, yang berhubungan dengan akses informasi, layanan publik, sikap, kebijakan. Tantangan kemudian adalah soal akomodasi yang layak. Tuna rungu-wicara butuh penerjemah, tetapi penerjemah yang seperti apa kemudian adalah soal akomodasi yang layak. Disabilitas netra: dia juga butuh akses informasi. Tapi dalam bentuk apa? Braille, file, atau orang yang menjelaskan? Ini penting sekali. Basisnya adalah penilaian (*assessment*).

Ini menjadi tantangan dalam gerakan. Ketika kita menempatkan aktor kunci dalam gerakan, kita harus tahu kebutuhan kawan-kawan itu seperti apa. Pernah suatu ketika, ada teman demo. Dia adalah orang terakhir yang berangkat dan disuruh membawa atribut

demo. Yang dibawa itu adalah atribut soal akses pemilu, padahal demo kita itu soal pendidikan inklusi. Ini penting, soal bagaimana *assessment* kebutuhan itu dilakukan, juga strateginya, supaya jangan salah. Pernah satu teman waktu demo digandeng oleh polisi, padahal dia sedang marah-marah kepada polisi.

Lalu di aspek pendidikan, soal bagaimana kurikulum, metode, aksesibilitas sangat penting. Ini yang sering tertinggal. Kemarin ada kasus 4 anak tidak bisa daftar sekolah karena alasan umur yang melebihi target. Kami di SLB kadang-kadang lebih tua karena harus ikut terapi macam-macam. Kedua, mereka ditolak juga karena alasan tidak adanya ujian daerah. Padahal di SLB itu tidak ada ujian daerah. Akhirnya 4 anak ini tidak bisa daftar sekolah. Ada alternatif, tetapi itu terjadi di sekolah yang memang ada fasilitas akomodasinya. Bagaimana dengan yang tidak? Sistem online pun ternyata belum akomodatif sepenuhnya.

Terima kasih banyak.

Kus:

Ada satu karya Mas Nanang yang judulnya menarik, “Bahaya Tuna Rasa”. Tuna rasa kata Mas Nanang itu suatu tuna yang paling berbahaya dan bisa diidap oleh semua orang, termasuk non disabilitas. Dia pernah mengajak seorang disabilitas untuk menonton pamerannya, dan ia ditanya “Wani piro?”.

Tadi sudah kita dengar banyak soal nuansa hegemoni oleh penguasa yang sangat kuat. Kita akan masuk ke upaya kreatif yang tidak melulu berharap pada pemerintah. Di sini juga hadir komunitas Sanggar Anak Aktor. Salah satu anggotanya diterima di ISI jurusan teater.

Triyono:

Saya sebelum 2014 belum sadar kalau saya difabel. Kesadaran atas difabel akhirnya membuat saya menelusuri apa itu difabilitas. Ada kesimpulan di mana saya cukup kecewa. Jadi ada 2 problem yang masih terseret di pola pikir lama, sementara sekarang sudah 4.0. Teman-teman yang *middle up* tidak ada masalah. Tapi untuk mereka yang *middle low*, mereka akan mengalami kesulitan di era sekarang. Saya kemudian mempelajari soal bentuk usaha macam Grab dll. Saya pelajari bahwa di era 4.0 itu tidak butuh ijazah, karena penentu utamanya adalah *skill*. Berarti di sistem ini ada peluang untuk tidak harus punya ijazah tinggi.

Awalnya Grab mau merekrut driver dengan roda tiga. Tapi ternyata UU lalu lintas jalan darat kita itu melarang seorang difabel menjadi driver. Tidak dapat asuransi. Juga, motor roda tiga tidak standar. Lalu kenapa bentor di Medan bisa berplat kuning? Sampai lima kali saya dulu memperjuangkan itu. Hingga detik ini tidak ada perubahan.

Tapi saya nekat. Saya buat Difabike. Untuk satu motor saya harus keluar 15-20 juta. Dan saya harus membuat minimal 3 buah motor sebagai prototype. Saya ingin merubah stigma,

potensi tenaga kerja, dan soal mobilitas. Sekarang bisa dibayangkan, duduk di atas kursi roda ke manapun tanpa turun dari kursi roda itu sangat sulit. Berbeda dengan di London. Di sana saya mencoba *black cab*. Semua ada ramnya. Mobilitas di sana sangat dihargai. Waktu 2015-an saya hanya berpikir bahwa selain dapat pemasukan dari penumpang, Difabike bisa membantu rekan untuk pergi bermobilitas. Dan akhir-akhir ini paling banyak lansia yang menggunakan jasa Difabike. Saat ini Difabike pakai aplikasi baru yang akan kerjasama dengan LinkAja. Dan saya juga ingin mengembangkan aplikasi alat bayar terutama untuk disabilitas.

Ini adalah era di mana peluang pekerjaan sudah berbeda dengan jaman dulu. Kita kemarin melatih teman-teman di *virtual tour*. Ada seorang difabel dengan neneknya membuat masakan spageti, direkam. Hanya dengan menjual videonya itu melalui AirBnB mereka dapat pemasukan. Proses berkarya Nanang juga sebenarnya bisa menjadi hal yang potensial secara ekonomi, selain estetika.

Khusus untuk teman tuna netra, era ini juga bisa memberi peluang yang tinggi. Misal untuk yang punya jasa pijat, praktik pijat juga bisa menjadi konten yang dapat dijual.

Mau gak mau kita harus bangun *branding* atas diri kita sendiri. Kita harus *rebranding*. Termasuk juga soal istilah BRTPD (Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas), itu adalah *rebranding* yang jelek. Saya buat gedung dengan nama Disability Entrepreneurship Center.

Terakhir, soal bagaimana nanti universitas yang mengakomodasi difabilitas itu bisa dibuat. Jadi kita tidak hanya mengonsumsi pengetahuan yang sudah ada, karena tidak semua itu mendukung kehidupan kita yang difabel.

Problematika terbesar kita adalah pada individunya. Kadang terlalu dininabobokkan melalui bantuan dll. Potensi yang seharusnya dimaksimalkan menjadi tumpul. Seharusnya individu fokus pada titik tertentu. Belum ada visi kuat membangun pribadi masing-masing. Kedifabilitan kita akan hilang ketika kita punya prestasi dan percaya diri.

DISKUSI

Sigit (Sanggar Anak Aktor):

Tadi Pak Setia menyatakan bahwa difabel harus mengadvokasi diri. Paling tidak membentuk aliansi. Dari pengamatan saya selama ini sangat sedikit difabel yang sadar bahwa saat ini sistem yang dibuat oleh negara sangat diskriminatif kepada difabel. Dan sangat sedikit yang tergerak untuk merubah sistem. Bagaimana cara kita mengadvokasi diri? Lalu, bagaimana menangkal politisasi yang dilakukan kepada kaum difabel? Misal, saat musim pemilu, kita sering digunakan oleh kelompok politik tertentu untuk penyuaan.

Jessica:

Bagaimana cara agar kita bisa menjadi percaya diri? Kamu (Triyono) tadi bilang kalau kita punya power, kita bisa terhindar dari tuna asmara, dsb.

Setia:

Bagaimana membangun kepercayaan diri? Ya, harus sering berantem. Contoh pada pelajaran fisika. Mobil bisa maju karena dia memenangkan tekanan dari depan. Itulah definisi maju. Bayangkan kalau ruangnya itu hampa. Kayak Bung Karno aja, dihajar habis, bangun kembali, begitu seterusnya. Persoalan versinya, silakan, masing-masing orang akan punya versi. Kata “masalah”: kalau kata “mas” ditutup, akan ada “alah”. Mau tidak mendapat “mas” dari “alah”? Membaca bukan hanya buku saja, tetapi juga pitutur, pengalaman dihajar dan ditipu orang. Akhirnya kita akan menemukan jalan. Kita akan menjadi kaya. Contohnya adalah Mas Triyono. Dia bisa begitu karena dihajar habis. Ketika anda banyak menyelesaikan masalah, orang akan melihat itu. Sehingga akan banyak orang datang kepada anda. Berbuatlah banyak, maka kau akan dapat banyak pula. Kesetaraan akan datang dari situ. Kesetaraan itu datang karena kita rebut.

Kedua, berpikir kritis. Saya memperjuangkan pemilu politik akses hanya sekali. Sejak Gus Dur ditolak, saya akhirnya tidak mau ikut lagi. Kita disuruh nyoblos, tapi hak kita tidak pernah dipenuhi. Semua “pil-pil” itu kebohongan. Kebalikan dari pil KB. Kalau pilkada itu *nek dadi, lali*; kalau pil KB: *nek lali, dadi*.

Di setiap kebaikan, pasti ada jebakan. Di setiap perjuangan, pasti ada pengkhianatan. SDGs (Sustainable Development Goals/ Pembangunan Berkelanjutan) sekarang bersemboyan *no one left behind*. Padahal SDGs itulah yang membuat negara kita hancur. Kita disuruh membangun kembali apa yang dirusak oleh para kapitalis itu. Tidak ada bantuan yang gratis. Ketika kita dibantu, kita memberikan kebebasan kita.

Sipora:

Yang bertanggung jawab atas kita adalah diri kita sendiri. Dari kecil memang saya digembleng untuk hidup mandiri, apapun itu. Justru ketika saya menangis karena diejek kawan, bapak selalu bilang: gapapa, tapi jangan sampai hari ini membuat kamu mati untuk besok.

Lalu ada hal lain yang saya juga belajar bahwa ketika melakukan sesuatu, lakukan dengan hati dan cinta. Ketika kita memberi air minum untuk anjing dan ayam, lakukanlah dengan cinta. Sehingga apa yang kita lakukan dengan tulus, pasti akan membuahkan spirit untuk kita. Konsep diri kita juga jadi lebih kuat.

Lalu koalisi harus selalu dibangun. Pada dasarnya kita tidak bisa sendiri, baik itu dalam keluarga, lingkungan rumah, dll. Berjejaring menjadi sangat penting, membangun kekerabatan.

Kawit:

Saya minta waktu. Saya sudah panas, ini arahnya ke sistem. Saya mendengar pembicaraan ini sebenarnya saya senang sekali tapi juga panas dada saya. Ibarat anak muda, saya ingin memberantas sistem itu!

Triyono:

Dari kecil saya selalu disuruh bermain oleh orang tua. Baik itu sepak bola, renang di sungai, dll. Ternyata dulu waktu itu saya dididik supaya jangan ada batas dengan yang lain. Ketika saya dihina, itu hajar saja. Ini menunjukkan bahwa ketika kita punya perlawanan, orang lain akan memperhitungkan.

Ada tiga hal. Pertama, memunculkan jiwa kompetensi. Yang membuat *value* kita naik itu apa? Jadi kita harus mengukur kemampuan kita yang benar-benar kita sukai. Perhatikan juga frekuensi arenanya. Kedua, adalah integritas. Seperti Bu Sipora yang aktif ikut dalam gerakan masyarakat. Terakhir, hidup itu *soundtrack*. Kita harus milih benar lagu yang enak untuk kita. Kalau klasik, ya kita harus milih klasik. Yang penting kamu menikmati, tapi tidak merugikan orang lain. Jadilah individu yang punya *soundtrack* masa depan yang didesain oleh dirimu sendiri.

Kus:

Sekali lagi kami membuka link untuk pertanyaan dan pendapat yang belum sempat disampaikan.